

MEMBANGUN CITRA POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

SKRIPSI

*Digubun Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Pembuatan Untuk Sarjana
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

BOBBY SANTANA SEMBIRING

**NIM : 07 840 0305
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PENGHESAHAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

N A M A : BOBBY SANTANA SEMBIRING
N I M : 07 840 0305
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : MEMBANGUN CITRA POLISI DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU INTAS

II. DOSEN PEMBING SKRIPSI :

NA M A : SUHATRIZAL,SH. MH
JABATAN : DOSEN PEMBINGBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. NA M A : SYAFARUDDIN,SH.M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

**ACC DIPERBANYA K UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA**

(WESSY TRISNA,SH.MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PENGHESAHAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

N A M A : BOBBY SANTANA SE MBIRING
NI M : 07 840 0305
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : MEMBANGUN CITRA POLISI DALAM
PENANGGULANGAN TINDAKTINDAK PIDANA
PERANGGARAN LALU LINTAS

II. DOSEN PEMBING SKRIPSI :

NA M A : SUHATRIZAL,SH. MH
JABATAN : DOSEN PEMBINGBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDATANGAN :

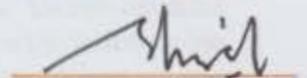
NA M A : SYAFARUDDIN,SH.M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

IV. PANITIA UJIAN HJAU

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS,SH.M.Hum
2. **SEKRETARIS** : TAUFIK SIREGAR SH.M.Hum
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL,SH.MH
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN,SH.M.Hum

TANDA TANGAN





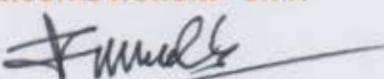


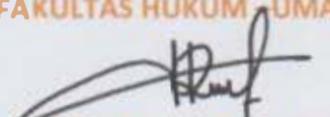


DISETUJUI OLEH :

D E K A N
FAKULTAS HUKUM –UMA

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDAAAN
FAKULTAS HUKUM –UMA


UNIVERSITAS MEDAN AREA
(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH)


(WESSY TRISNA,SH.MH)

ABSTRAK

MEMBANGUN CITRA POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

O L E H

BOBBY SANTANA SEMBIRING

NIM : 07 840 0305

BIDANG HUKUM PIDANA

Kemerosotan citra Polri tersebut hampir merata di semua bidang tugas dan wewenangnya, termasuk dalam praktik penegakan hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa terdapat pula banyak hal positif dari yang dihasilkan dan diperjuangkan oleh korps kepolisian, dan itu berarti masih banyak aparat kepolisian yang berprestasi baik dan berkualitas. Namun, semua yang baik dan positif itu seolah tenggelam berseiringan dengan munculnya kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut telah mencoreng wajah Polri, dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara kerja yang dimainkan oleh Polri.

Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan bagaimana strategi yang perlu diambil kepolisian untuk membangun citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan respon masyarakat terhadap tindakan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas; polisi mampu mewujudkan kondisi kekeluargaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lebih responsive, simpatik dan tidak membedakan siapapun yang berurusan dengan polisi. Respon masyarakat terhadap kinerja polisi dalam menangani kasus LAKA lalu-lintas amat positif, karena sebagai mediator antara pelaku dan korban, polisi bertindak disiplin dalam mediasi penal. Respon masyarakat terhadap polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu-lintas positif karena landasan penanggulangan dengan dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dapat dikemukakan adanya enam faktor, yaitu: profesionalisme/intelektualisme, mediator, ketakwaian, keteladanan, disiplin dan taat peraturan dan faktor terakhirnya adalah kewibawaan. Keenam faktor tersebut sangat berpengaruh bagi tumbuhnya citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu-lintas. Strategi yang perlu diambil kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu-lintas melalui integrated prevention effort antara warga masyarakat dan polisi. Di sisi lain reformasi diri merupakan upaya polisi dalam membangun citranya. Termasuk reformasi profesionalisme/intelektualisme, keteladanan polisi. Jadi reformasi diri polisi yang utama adalah reformasi cultural.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul "MEMBANGUN CITRA POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS".

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

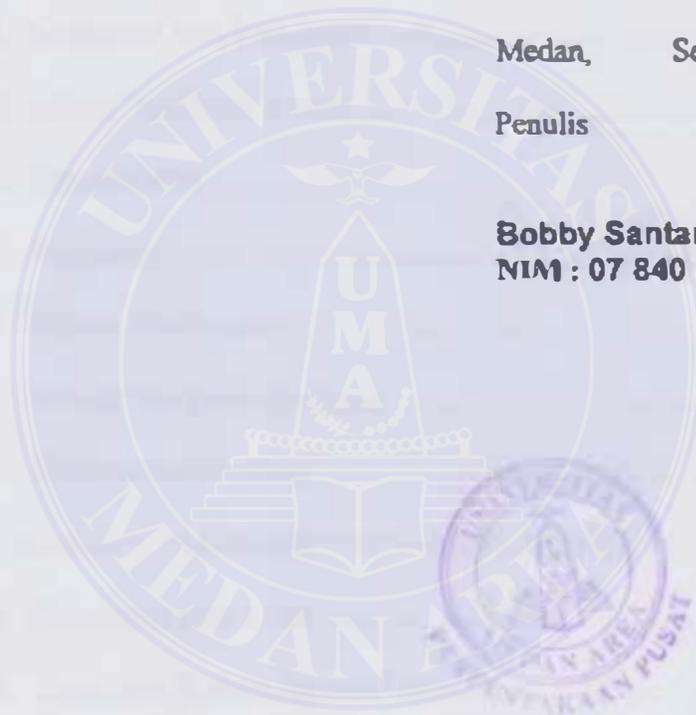
Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

Penulis

Bobby Santana Sembiring
NIM : 07 840 0305



DAFTAR ISI

Malam

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengasan Dan Pengertian Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan.....	7
D. Hypotesa	8
E. Tujuan Pembahasan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI LALU LINTAS.....	12
A. Pengertian Lalu Lintas.....	12
B. Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas.....	15
C. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas.....	16
D. Pengertian Kendaraan dan Pengemudi	21
E. Kecelakaan Lalu Lintas.....	23
BAB III. PERBUATAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS	26
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	26
B. Pengertian Perbuatan Pidana	28

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	31
D. Beberapa Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas	33
BAB IV. UPAYA MEMBANGUN CITRA KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS.....	39
A. Respon Masyarakat Terhadap Tudakan – Tindakan Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana dan Pelanggaran Lalu Lintas	39
B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Citra Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu –Lintas	47
C. Strategi yang Perlu Diambil Kepolisian untuk Membangun Citraaya dalam Menanggulangi tidak pidana pelanggaran lalu lintas.....	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Tentara Nasional Indonesia. Tujuan utamanya, menjaga ketubuhan dan kedaulatan Negara. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tersebut merupakan landasan dibentuknya UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terdapat dan tegaknya hukum, terselenggaranya pertindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selaku bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung di berikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan.

Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri, andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.¹

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas selama beberapa tahun terakhir ini, terutama tahun 2008-2010, seolah membenarkan bahwa citra Polri di mata masyarakat memang belum begitu baik. Sekalipun secara umum hasil jajak pendapat Kompas tahun 2010 memperlihatkan bahwa citra Polri pada usianya yang ke-60 tahun menunjukkan peningkatan yang kian positif (51%) bila dibandingkan

¹ Jaya Suprana, "Polisi dan Pelayanan Masyarakat", Makalah Seminar Nasional Polisi I, ~~diorganisasi~~ oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995, hal. 1

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, *Strategi Pengakuan hukum di jalan raya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- Ali Masyhar, *Menggagas Adanya Lembaga Penyidikan : Sebuah Keritik Pada Lembaga Kepolisian*, Universitas Airlangga, Semarang.
- Anton Tabah, *Sosok Polisi Masih dilihat dari Kulitnya*, Cipta Manunggal, Jakarta, dalam *Merenungi Kritik terhadap Polri*, Kunarto.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Edward A Thibault, Lawrence M. Lynch dan R. Bruce Mc. Bride, *Proactive Police Management*, Cipta Tunggal, Jakarta, 2001.
- Jaya Suprana, "Polisi dan Pelayanan Masyarakat", *Makalah Seminar Nasional Polisi I*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995.
- JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.
- Magandar Sianipar, *Partisipasi Masyarakat dan Korelasinya, Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Tunggal, Jakarta, 1995.
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara. Jakarta, 1995.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1990.
- Suitani, "Profesionalitas Polri di Tengah Membaiknya Pamor", *Artikel Harian Kompas*, 03 Juli 2011.

Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut., *Pemuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

